

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Dwipayana, et.al., *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003)
- Etik Takririah: “*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*” (Banten: Iain Smh Banten, 2016).
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 1950.
- Huda Ni'matul, 2020, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang
- Huda, Miftahul. 2021. “*Kejian Yuridis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*” Universitas Muhammadiyah Jember.
- Hanif Nurcholis, “*Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Janedjri M Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.
- Mashuri Mashab. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Polgov.Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mukhaelani, *Pilkades dan Pembelajaran Politik*. Grobogan: Pusta Pelajar Tahun 2013.
- Mulyadi, Dedi. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Nuraeny, Henny. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Wajah Hukum Pidana, Asas Dan Perkembangannya*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Poloma, Margareth M. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet. III*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009)
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011).

- Achir, Nuvazria. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jambura Law Review* 2.1 (2020)
- Ahmad Yani, "Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2, (2022)
- Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Aridhayandi, M. Rendi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 4 (2018)
- Astuti, Hesti Dwi. "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, No. 2 (2017)
- Debora Sanur Lindawaty, "Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina", *Jurnal Politica*, Volume 3, Nomor 2, November 2012
- Dunga, Weny Almoravid, and Abdul Hamid Tome. "Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo." *Jambura Law Review* 1.1 (2019): 1-21.
- Farida, Ida. 2019. "Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1):1. doi: 10.25157/jigj.v7i1.2137.
- Faridhi, Adrian. 2016. "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016." *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1):150-64. doi: 10.31849/respublica.v16i1.1433
- Hanafi, Ferdiansyah, and Iswandi. 2021. "Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3).
- Kuswandi, "Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesarbesarnya Kemakmuran Rakyat," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, No. 2 (2017)
- May Lim Charity, "Desa Pasca Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014
- Nggilu, Novendri, and Fence M. Wantu. "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15.1 (2020)
- Nur, Hilman. "Peluang Dan Ancaman Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, No. 2 (2017)
- Nuraeny, Henny. "Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur," *Journal Of Empowerment* 1, No. 1 (2017)

- Nuriyanto. *"Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?"*. Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014)
- Raras, Brigita. *"Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara."*Jurnal Politico 7, no. 1 (2017).
- Rusman, *"Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum Dan Keadilan,"* Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, No. 2 2017.
- Satriawan, Muhammad Iwan. *"Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia."* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2013)
- Yuningsih, Neneng Yani dan Subekti, Valina Singka. *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.*Jurnal Politik, 1 (2), 2016
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013